

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV SURYA PELANGI

SKRIPSI

OLEH:

RESKA ZAHERA
NIM 11573203101



PROGRAM STUDI S1
JURUSAN S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RESKA ZAHERA
 NIM : 11573203101
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : AKUNTANSI S1
 JUDUL : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
 BADAN PADA CV SURYA PELANGI

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING

KHAIRIL HENRY, SE, M.Si, Ak.CA

NIP. 19751129 200801 1 009

MENGETAHUI :

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Drs. H. MUH SAID HM. M.Ag.MM

NIP. 19620512 198903 1 003

NASRULLAH DJAMIL, SE, M.Si, Ak.CA

NIP.19780808 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

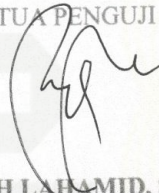
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RESKA ZAHERA
NIM : 11573203101
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA CV SURYA PELANGI
HARI/TANGGAL UJIAN : JUMAT, 08 JANUARI 2021

DISETUJUI OLEH

KETUA PENGUJI



QOMARIAH LAIAMID, SE, M.SI
NIP. 19750704 200710 2 001

MENGETAHUI :

PENGUJI I



KHAIRIL HENRY, SE, M.SI, AK.CA
NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II



SONIA SISCHA EKA PUTRI, M.AK
NIP. 19940917 201903 2 021

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV SURYA PELANGI

OLEH :

RESKA ZAHERA
11573203101

Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pajak penghasilan badan menurut PSAK dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada CV Surya Pelangi. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan CV Surya Pelangi yang beralamat di Jl.Puyuh Mas Tangkerang Tengah Pekanbaru. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis dan hasil perhitungan penulis dapat diambil kesimpulan bahwa CV. Surya Pelangi sudah menerapkan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan menurut PSAK, tetapi masih terdapat beberapa akun beban usaha yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Akun beban yang belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang disajikan adalah beban konsumsi, beban prive, beban entertaint, sumbangan, infak dll, dan beban biaya asuransi.

Kata Kunci: *Akuntansi Perpajakan, PSAK, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillah robbil alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis serta shalawat dan salam kepada nabi besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada CV SURYA PELANGI”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan program studi Akuntansi S1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan baik secara moral maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Teristimewa ku persembahkan kepada ayah dan bundaku, bapak Rusli dan Ibu Rabu Intan, beserta abang dan adikku Roy Putra dan Rafid Alhaqqi, yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan dalam segala bentuk, terimakasih untuk kasih sayang yang tiada henti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag. M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si, Ak.CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Amrul Muzam, SHI, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus sebagai orang tua kami disaat berada dalam lingkungan kampus yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Akt, Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
9. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, Ak, CA selaku pembimbing konsultasi Proposal dan skripsi penulias yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Masteven Romus, bpk Mulia Sosiady, bpk Andri Novius, Ibu Febri Delmi, ibu Elisanovi, ibu Desrir Miftah dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
12. Pemilik CV Surya Pelangi beserta karyawan yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Terimakasih untuk keluarga besar kami, Toknga H.Azai, Etek Daniar, Tokcu Khairul, Etek Nurjaiti, Etek Yuniarti, Dr. Aspri Rahmat Azai, MA, Kak Asyati Rudiah, Keponakan tersayang Aisyah Munawwaroh, dan Rafa Azka, Serta Indra lesmana dan seluruh keluarga besar lainnya yang tidak bisa penulis tulis satu persatu.
14. Terima kasih kepada Sahabat sekaligus teman terdekat penulis selama kuliah Dini Oktaviana, Shella Novelia, Dennisya Marwa, Indah Melya Putri, Aini Nurhayati, Minarti Sara yang telah menemani dari awal perkuliahan dan memberikan semangat dalam pembuatan Skripsi ini.
15. Terimakasih untuk tim keseblasan Nova Ria wulandari, Sri Anggi Dewi, Aisa Rahmawati, Devikha Asmaditha S, Novi Anggraini, Respita Nurma desti, Ainun Mardiah, Widiani, Windi Oktami, Endang Hariyati, dan teman seperjuangan selama menyelesaikan Perkuliahan Nina Sany Fajarini, Ayu Fitriani, Intan Nurjannah, Hasnur dan lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi untuk sama-sama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan serta tak bosannya selalu mendengarkan keluh kesah dalam perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

16. Keluarga besar Akuntansi SI khususnya Lokal H 2015, dan juga Seluruh Teman-teman S1 Akuntansi Konsentrasi Perpajakan Lokal C angkatan 2015 yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
17. Tim PPL 2018 dan juga seluruh pimpinan dan karyawan PTPN V, khususnya pak Wo, pak Rudi, ibu sani, ibu lankis, yang telah memberikan banyak sekali ilmu dalam dunia pekerjaan kepada penulis.
18. Tim KKN Pulau Lawas beserta seluruh warga desa pulau lawas yang memberikan keceriaan sewaktu KKN dan pastinya juga selalu memberikan doa serta dukungannya kepada penulis.
19. Keluarga besar BEM UIN SUSKA RIAU 2017 Kabinet Kita UIN SUSKA khususnya Kementrian Adokesma, Keluarga Besar BEM FEKONSOS 2019 Kabinet Senyum Kebaikan khususnya Dinas Advopol, Keluarga Besar KAMMI se-Riau khususnya Komsat UIN SUSKA, Keluarga Besar Rohis Fekonsos ISC Al-Iqtishodi, Keluarga Besar HMJ Akuntansi S1, Keluarga besar Aktivis Rohis Kampar, Keluarga besar Ma'had Al-jamiah UIN SUSKA RIAU khususnya Wihdah Khodijah, keluarga besar Sahabat Ombudsman Riau, Terima kasih telah menjadi inspirasi dan media untuk terus menimba ilmu.
20. Terimakasih Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan Skripsi ini dan yang selalu menanyakan kapan wisuda yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan baik dari isi maupun konsep penyusunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, penulis menerima dengan terbuka berbagai kritik dan saran yang berhubungan dengan skripsi ini yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan selanjutnya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca maupun untuk penelitian selanjutnya.

Aamiin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 17 Desember 2020

Penulis,

Reska Zahera

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode penelitian	6
1.6 Sistematika Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Akuntansi	9
2.2 Perpajakan	10
2.2.1 Pengertian Perpajakan	10
2.2.2 Pengertian Akuntansi Pajak	12
2.2.3 Pengertian Pajak Penghasilan	12
2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Pajak	13
2.3 Subjek Pajak Penghasilan	17
2.4 Objek Pajak Penghasilan	21
2.5 Tarif Pajak	27
2.6 Wajib Pajak Badan	28
2.6.1 Pengertian Badan dan Wajib Pajak Badan	28
2.6.2 Pajak Penghasilan Badan	29
2.6.3 Kewajiban Wajib Pajak Badan	30
2.6.4 Pembukuan	31
2.6.5 Kewajiban Melakukan Pemotongan dan Pemungutan	32
2.6.6 Saat Terutang, penyeteroran dan pelaporan PPh Badan	37

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.7 Teori Pajak	38
2.6.8 Pencatatan Akuntansi Pajak	39
2.7 Perhitungan Laba Menurut Undang-undang Perpajakan ...	40
2.7.1 Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan Bruto	43
2.7.2 Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai Biaya	46
2.8 Akuntansi Pajak Penghasilan	49
2.9 Pelaporan SPT	51
2.9.1 Pengertian SPT	51
2.9.2 Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan	51
2.9.3 Jenis SPT	52
2.9.4 Batas Waktu Penyampaian SPT	52
2.10 Pandangan Islam terhadap Pajak	54
2.11 Penelitian Terdahulu	60
2.12 Kerangka Pemikiran	64
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
3.1 Sejarah Singkat Usaha Konveksi Surya Pelangi	64
3.2 Visi dan Misi	65
3.3 Tujuan Mendirikan Konveksi Surya Pelangi	66
3.4 Struktur Organisasi	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Penelitian	68
4.1.1 Akuntansi Pajak Penghasilan CV. Surya Pelangi.....	68
4.1.2 Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan CV. Surya Pelangi	72
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif Pajak	28
Tabel 2.2	Batasan Waktu Pelaporan SPT Masa	53
Tabel 2.3	Batasan Waktu Pelaporan SPT Tahunan	54
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	60
Tabel 4.1	Laporan Laba Rugi CV. Surya Pelangi Tahun 2018.....	71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	63
Gambar 3.1 Struktur Organisasi CV Surya Pelangi	67





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Di sisi lain masyarakat (Wajib Pajak) mengidentikkan pembayaran pajak menjadi sebuah beban yang akan mengurangi laba. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Mardiasmo (2016:129) menyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam pembangunan nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Salah satu sumber penghasilan dari pajak yang didapatkan oleh negara adalah pajak penghasilan badan.

Untuk mengetahui besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha, pemerintah perlu menetapkan undang-undang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur bidang perpajakan. Undang-undang perpajakan inilah yang nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban mereka kepada negara.

Bagi perusahaan, pajak merupakan unsur penting yang ada pada suatu perusahaan, dimana dengan adanya perhitungan pajak. Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak. Pajak juga merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Terlebih lagi perusahaan yang berskala nasional ataupun internasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Laporan keuangan sebagai proses dari akuntansi selama ini dipandang dapat membantu para pemakai laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu. Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPH) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
Sta Ismij University of Sintang
Syarif Kasim Riau

Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan.

Pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut perusahaan. Hal ini terjadi karena fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan berpedoman kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan penghasilan dan beban.

Adapun beberapa perbedaan pengakuan menurut Akuntansi dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang dijumpai pada CV Surya Pelangi yaitu pada saat melakukan pengamatan, penulis mendapatkan informasi bahwa penyajian beban konsumsi pada laporan laba rugi CV. Surya Pelangi tahun 2018 tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 tentang bagian yang dikecualikan dari objek pajak pada ayat 3 bagian “d” yang menyatakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Berdasarkan ketentuan tersebut perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif terhadap beban konsumsi sebesar Rp. 235.357.500.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penyajian beban *prive* pada laporan laba rugi CV. Surya Pelangi tahun 2018 tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 tentang menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pada ayat 1 bagian “i” yang menyatakan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Berdasarkan ketentuan tersebut perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif terhadap beban *prive* sebesar Rp. 62.703.026.

Penyajian biaya entertain, sumbangan, infak dll pada laporan laba rugi CV. Surya Pelangi tahun 2018 tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 tentang menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pada ayat 1 bagian “g” yang menyatakan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dikarenakan bukti sumbangan pada sumbangan, infak dll pada CV. Surya Pelangi tahun 2018 tidak mempunyai bukti maka CV. Surya Pelangi harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 13.126.000.

Penyajian biaya asuransi pada laporan laba rugi CV. Surya Pelangi tahun 2018 tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2008 Pasal 9 tentang menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pada ayat 1 bagian “d” yang menyatakan premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif terhadap biaya asuransi sebesar Rp. 3.250.000.

Dari masalah-masalah yang penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada CV Surya Pelangi dengan Judul : “**Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada CV Surya Pelangi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan menurut PSAK dan *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008* pada CV Surya Pelangi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan menurut PSAK dan *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008* pada CV Surya Pelangi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang akuntansi pajak penghasilan badan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagi Perusahaan, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam mengoreksi dan menghitung pajak penghasilan badan pasal 25 serta perhitungan pajak yang terutang pada akhir tahun.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada CV Surya Pelangi yang berlokasi di Jl. Puyuh Mas Ruko No. 2A-2B Tangkerang Tengah, Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah CV Surya Pelangi.

b. Objek penelitian

Objek Penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi CV Surya Pelangi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan dalam berbentuk sudah ada seperti : Laporan Laba Rugi dan lain sebagainya.

Sumber data yang digunakan :

a. Data primer

Yaitu data yang mengenai cara penyusunan laporan keuangan dan penerapan ketentuan akuntansi pajak yang digunakan oleh perusahaan dan diperoleh dari Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi atau sudah ada seperti : Neraca, Laporan Laba rugi, Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) pada tahun 2018, surat keterangan terdaftar dari perusahaan dan struktur organisasi yang juga diperoleh dari Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lain, dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan Kepala Bagian Keuangan dan Bagian Umum CV Surya Pelangi untuk mendapatkan data cara perhitungan Pajak Penghasilan.

5. Metode Analisis Data

Metode ini digunakan untuk menganalisis data. Penulis menggunakan metode deskriptif yang mana semua data yang telah dikumpulkan di analisis dengan menghubungkan antara perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dan menerapkan akuntansi yang berlaku, yang kemudian di tarik kesimpulan sebagai akhir dari penelitian.

1.6 Sistematika Penelitian

Agar lebih memahami mengenai susunan skripsi ini, penulis membaginya dengan uraian pokok dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan atau menguraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian

BAB III : Bab ini akan menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan objek penelitian yaitu CV Surya Pelangi. Disini akan dibahas mengenai sejarah perusahaana, aktivitas perusahaan serta struktur organisasi sesuai bidang dan wewenang dari masing-masing bagian.

BAB IV : Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai CV Surya Pelangi sehubungan dengan Undang-Undang pajak penghasilan serta penerapannya pada perusahaan tersebut. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, kewajiban pajak dan akuntansi pajak.

BAB V : Berisi kesimpulan penulis terhadap masalah-masalah yang ada dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut *Charles T. Horngren, dan Walter T. horrison* mengatakan bahwa : Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. (Sujarweni, V. Wiratna, 2016:2)

American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. (Hery, 2013:3)

Definisi ini mengandung beberapa pengertian, yaitu :

1. Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi.
2. Bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, menunjukan bahwa akuntansi bukan saja hanya mencakup fungsi pencatatan dalam menghasilkan informasi keuangan akan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan menyediakan informasi yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Selanjutnya informasi akuntansi dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini terdapat adanya perbedaan antara manajemen perusahaan yang menyusun informasi dengan pihak-pihak lain perusahaan sebagai pemakai laporan. Agar informasi akuntansi mempunyai tingkat komunikasi dalam bahasa yang sama maka manajemen perusahaan haruslah mempunyai standar atau berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Perpajakan

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro (2014:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Menurut *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*, pajak dapat diartikan sebagai:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi yang diberikan oleh Soemitro, menyatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Sumarsan, 2013:3)

Adapun definisi yang diberikan oleh Dr. Soeparman Soemohamijaya, menyatakan sebagai berikut, “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” (Sari, 2014:35)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*KUP*) adalah sebagai berikut, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, antara lain:

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Tanpa jasa timbal

(*kontraprestasi*) di Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan Negara.

2.2.2 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Hidayat (2014:335), akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi umum (general accounting), sehingga WP tidak perlu membuat dua pembukuan cukup satu pembukuan berdasarkan SAK, kemudian dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Inti dari Akuntansi Pajak Penghasilan adalah melakukan rekonsiliasi fiskal laporan keuangan fiskal sebagai dasar pengisian SPT tahunan PPh. Sesuai Self assessment, penyesuaian fiskal dilakukan oleh WP, mulai tahun pajak 2002 penyesuaian fiskal dimasukkan kedalam Lampiran 1 SPT Tahunan PPh WP Badan.

Menurut Waluyo (2014:35), akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan – aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

2.2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Jamaluddin, 2011:86). Dengan kata lain pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi Negara yang tertuang dalam undang-undang yang ditujukan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat yang berpenghasilan yang telah memenuhi syarat terhadap penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pajak penghasilan dalam hal ini pajak penghasilan badan dibayarkan setahun sekali dan dikenakan sanksi berupa denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Pajak sifatnya dapat dipaksakan dan diatur dalam undang-undang yang berlaku sehingga setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum perpajakan yang berlaku. Hal demikian dilakukan agar para wajib pajak taat dan patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah sehingga penghasilan yang memang seharusnya diterima oleh pemerintah tidak diselewengkan oleh para wajib pajak.

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Pajak

Tujuan Laporan keuangan menurut Pajak adalah:

1. Tujuan Penyusunan / Pembuatan Laporan Keuangan adalah :

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, tujuan Laporan Keuangan adalah Menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian Laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger yang akuisisi. Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrument yang diklasifikasi sebagai entitas. (Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS, 2012:117-118).

2. Tujuan dari Laporan Keuangan pajak

Adapun tujuan dari laporan keuangan pajak menurut gurupendidikan.co.id adalah:

- a. Memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) .
- b. Membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
- c. Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem *self assessment*, terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak.

3. Ciri Kualitatif Laporan Keuangan Pajak

Adapun ciri kualitatif laporan keuangan pajak menurut gurupendidikan.co.id adalah :

- a. Dapat dipahami oleh petugas/pemeriksa pajak.
- b. Sensitivitas informasi, bukan materialitas.
- c. Laporan Keuangan Fiskal disajikan secara jujur, dengan itikad baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*deductible expenses*) adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dihitung dari penghasilan neto.

- d. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang-piutang antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan.
- e. Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun buku.
- f. Akuntansi pajak harus independen terhadap akuntansi komersial.
- g. Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

4. Pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal

Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Pada pendekatan ini, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, setidaknya ada 2 (dua) laporan yang disusun oleh wajib pajak, yaitu:

- a. Laporan keuangan komersial.
- b. Laporan keuangan fiskal.

Ketentuan pajak merupakan standar yang terpisah dari praktek akuntansi. Pada pendekatan kedua, wajib pajak bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi. Untuk kepentingan pajak, wajib pajak menyusun sebuah laporan keuangan fiskal melalui proses penyesuaian dan rekonsiliasi antara praktek akuntansi dengan ketentuan perpajakan.

Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi. Pada pendekatan terakhir, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi. Namun, preferensi diberikan kepada ketentuan pajak apabila terdapat pengaturan yang tidak sejalan dengan standar akuntansi.

5. Penyusunan laporan keuangan fiskal

Pajak tidak mengatur secara khusus mengenai cara atau alur dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, wajib pajak dapat mengikuti alur penyusunan laporan keuangan yang terdapat dalam akuntansi komersial.

Laporan keuangan dimulai dari pencatatan dokumen-dokumen dasar yang terjadi dalam sebuah transaksi ke dalam buku harian atau jurnal harian. Kemudian, jurnal harian tersebut dimasukkan (*posting*) ke dalam buku besar. Pada akhir periode, dari buku besar disusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Dengan penyesuaian terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi pada akhir tahun dan catatan penutup (*closing entries*), disusunlah sebuah neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah penyesuaian tersebut, diperoleh sebuah laporan keuangan komersial.

Untuk kepentingan pajak, laporan keuangan komersial disesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku sehingga diperoleh sebuah laporan keuangan fiskal. Penyesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan pajak lebih dikenal dengan sebutan rekonsiliasi fiskal.

2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo, (2016:163) Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Penggolongan subjek pajak menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. Orang pribadi
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

- a. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
3. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
4. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- a. Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - 1) Kantor perwakilan negara asing;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; Dan
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- b. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (pasal 4 ayat 3) pihak yang menjadi objek pajak penghasilan:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: (pasal 4 ayat 2)

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, busa jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak (pasal 4 ayat 3) adalah:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah ;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
11. Dihapus;
12. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
13. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
14. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

15. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan menurut *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008* dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
2. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
3. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan hutang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Hadiah undian. (Azhari S, 2006 : 44)

2.5 Tarif Pajak

Sumarsan, (2010:199) menyebutkan sesuai dengan Tarif PPh Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009) antara lain sebagai berikut Wajib Pajak Badan dalam Negeri sebesar 28% dan sebesar 25% yang berlaku sejak tahun pajak 2010.

Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E yaitu jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{PKP}$.

Tabel 2.1 Tarif Pajak

Wajib pajak dalam negeri orang pribadi Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000.-	15%
Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	Tarif pajak
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	25%

Sumber : Perpajakan Indonesia

2.6 Wajib Pajak Badan

2.6.1 Pengertian Badan dan Wajib pajak badan

Menurut *UU No. 28 tahun 2007* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

2.6.2 Pajak Penghasilan Badan

Pada pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu:

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.6.3 Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan

Berikut kewajiban dari Wajib Pajak Badan:

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Untuk wajib pajak badan atau pengusaha kecil yaitu selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi, apabila peredaran brutonya lebih dari 600 juta maka wajib mengukuhkan diri menjadi PKP.

Pada pasal 2 ayat (4) UU KUP, “Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.

Sebagaimana terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

2.6.4 Pembukuan

Menurut *UU No. 28 tahun 2007* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data & informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi/laba pada saat tahun pajak berakhir.

Ketentuan mengenai Pembukuan. Pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu
3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas.
4. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.

Prinsip Taat Asas:

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Misalnya dalam penerapan: Stelsel pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi.

2.6.5 Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan

Diantaranya yaitu:

1. Kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29);
2. Kewajiban memotong atau memungut (pot/put) pajak atas penghasilan orang lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final); dan
3. Kewajiban memungut PPN dan atau PPnBM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan secara umum bisa diuraikan sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21/Pasal 26

Yaitu PPh yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh.

Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli, yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek PPh Pasal 21, kepada orang pribadi yang berstatus WP luar negeri, PPh yang dipotong mengacu pada ketentuan Pasal 26 UU PPh atau berdasarkan tax treaty.

Kewajiban PPh Pasal 21/Pasal 26 yang harus dilaksanakan, meliputi:

a. SPT Masa PPh Pasal 21/26 pada setiap Masa Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan disetor oleh Wajib Pajak Badan, yang terutang pada setiap masa pajak. PPh Pasal 26 yang terutang atas pembayaran kepada orang pribadi yang berstatus Wajib Pajak Luar Negeri juga wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21. Pada dasarnya, PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa merupakan angsuran atau pajak dibayar di muka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk PPh Pasal 21 yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

b. SPT Masa PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan dilunasi pada suatu tahun pajak, termasuk PPh Pasal 26 yang terutang atas penghasilan orang pribadi berstatus WP luar negeri. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Akhir Tahun Pajak sebenarnya merupakan penghitungan ulang atas PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember. Bisa jadi, pada SPT Masa PPh Pasal 21 pada akhir tahun nantinya timbul kurang bayar, atau lebih bayar, atau mungkin juga nihil (PPh Pasal 21 yang sudah disetor sama dengan PPh Pasal 21 yang terutang).

c. PPh Pasal 23

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh.

d. PPh Pasal 26

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen; bunga; royalti; sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan; serta pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima/diperoleh WP luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 UU PPh.

Penghitungan dan penyeteroran PPh Pasal 26 sebaiknya tetap dilakukan secara tersendiri, meskipun untuk pelaporannya digabungkan dengan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, tergantung pada jenis objek pajaknya serta penerima penghasilannya;

- 1) Jika objek pajaknya cenderung sama dengan PPh Pasal 21 dan penerima penghasilannya adalah orang pribadi berstatus WP luar negeri, maka pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26;
- 2) Jika penerima penghasilannya berbentuk badan dan berstatus WP luar negeri, pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.

e. PPh Final

Yaitu PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (special treatment) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi, seandainya Wajib Pajak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final yang terutang atas sewa kantor tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. PPh Pasal 25

Yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta ketentuan pelaksanaannya.

g. PPh Pasal 29

Yaitu kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

h. PPN

Yaitu pemungutan pajak atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean, yang meliputi suatu masa pajak. Dalam hal BKP tergolong barang mewah, terdapat Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang juga terutang sesuai ketentuan UU yang berlaku.

2. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak.
4. Kewajiban membuat faktur pajak.
5. Kewajiban melunasi bea materai.
6. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.

2.6.6 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan

Menurut Mardiasmo, (2016:170) Saat terutang dari pajak penghasilan badan adalah pada saat badan atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh badan harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (angsuran pajak).

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau bank Devisi Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara online. Pembayaran pajak harus digunakan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka penyetoran kekurangan pajak yang terutang (pph pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT tahunan disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksimal disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

2.6.7 Teori pajak

Menurut Purwono, (2010:4) menyatakan Ada 5 teori yang mendasari negara untuk untuk memungut pajak, Yaitu :

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta harta bendanya.

2. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa dan hartanya.

3. Teori Asas Gaya Pikul

Pokok dari teori ini adalah keadilan, yaitu beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. Gaya pikul ialah kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan mutlak untuk kebutuhan primernya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Dalam penyelenggaraannya, negara yang lahir dari persekutuan individu-individu secara mutlak memiliki kewenangan-kewenangan di segala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak dari individu-individu tersebut.

5. Teori asas gaya beli

Teori ini menitikberatkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan pada kepentingan individu maupun kepentingan negara.

2.6.8 Pencatatan Akuntansi Pajak

Menurut Eko Susanto (2014:15), Pencatatan adalah dokumen lain tersebut wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan. Di bawah ini adalah kegiatan dokumentasi yang diwajibkan bagi WP.

DJP memberikan keringanan bagi WP baik badan dan WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan yang tidak mampu secara administrative untuk melakukan pembukuan diwajibkan untuk melakukan pencatatan. Ketentuan ini dimulai sejak 1 Januari 2001, yang menginstruksikan WP untuk melakukan pencatatan penghasilan yang diterima selama 1 (satu) tahun (personal accounting). Ketentuan bagi WP yang menggunakan metode pencatatan ini diatur peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009, dan batas omzet bagi WP yang melakukan pencatatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 4,8 miliar. Kemudian untuk menghitung penghasilan netto, WP yang melakukan pencatatan pada setiap transaksinya dapat menggunakan norma perhitungan yang diatur dalam KEP-536/PJ./2000.

2.7 Perhitungan Laba menurut Undang-undang Perpajakan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Untuk memudahkan pembaca laporan keuangan agar memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus diidentifikasi dengan nama perusahaan, jenis laporan, tanggal atau periode waktu tertentu dan juga harus diperhatikan judul, catatan kaki, tanda mata uang dan peraturan-peraturan dalam laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim.

Sedangkan laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan terdiri dari komponen-komponen:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan Arus kas
5. Catatan atas pelaporan keuangan (IAI,2004: 1.3)

Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang (IAI, 2004 : 25.1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penghasilan (*income*)

Penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*).

Definisi penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004 : 23.1) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

2. Beban (*expense*)

Pengertian beban menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan entitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

Sedangkan biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan.

3. Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengakuan (*recognition*) adalah proses secara formal untuk mencatat atau menggabungkan suatu pos didalam perkiraan dan laporan keuangan suatu perusahaan (IAI, 2004 : 21).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Sedangkan beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

Menurut Undang-undang perpajakan Sebagaimana telah diketahui bahwa ada wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan. Perhitungan PPh tahunan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan ini dimulai dengan menghitung penghasilan netto untuk mendapatkan dasar pengenaan pajaknya, biasanya disebut penghasilan kena pajak.

a. Biaya

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dua golongan yaitu:

- 1) Beban atau biaya yang mempunyai manfaat tidak lebih dari satu tahun, misalnya: biaya gaji, biaya administrasi dan biaya bunga.
- 2) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, misalnya: pembebanan dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Biaya yang boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan *bruto* (*deductible expenses*).
- 2) Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilanbruto (*non deductible expenses*).

Untuk kepentingan penghitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

2.7.1 Biaya-biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

Untuk kepentingan perhitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam Sukrisno Agoes, (2013:226-227). UU PPh Pasal 6 tersebut berbunyi :

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Biaya pembelian bahan;
- 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
- 3) Bunga, sewa, dan royalti;
- 4) Biaya perjalanan;
- 5) Biaya pengolahan limbah;
- 6) Premi asuransi;
- 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 8) Biaya administrasi; dan
- 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
 3. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

2.7.2 Pengeluaran-Pengeluaran yang Tidak boleh Dibebankan sebagai Biaya

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) *UU Nomor 36 Tahun 2008* tentang Pajak Penghasilan menetapkan biaya atau pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

2.8 Akuntansi Pajak Penghasilan

Adapun akuntansi Pajak Penghasilan yang dimaksud adalah pencatatan yang dilakukan terhadap angsuran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25.

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Adapun pemotongan PPh Pasal 23 terdiri atas:

- a. Badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan negeri lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemotongan ini sifatnya otomatis dan tidak ada penunjukan sebagai pemotongan PPh Pasal 23

- b. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang wajib membayarkan penghasilan.

Penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23 adalah:

- 1) Dividen.
- 2) Bunga.
- 3) Royalti.
- 4) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- 5) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
- 6) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 7) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 25

Ketentuan Pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

Untuk menghitung PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
- c. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

2.9 Pelaporan SPT

2.9.1 Pengertian SPT

Pasal 1 angka 11 Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Muldjono,2011 :102)

2.9.2 Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak Penghasilan

Fungsi Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo, (2016:31) antara lain:

1. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.
2. Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
3. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masa Pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.9.3 Jenis SPT

Menurut Suparmono, (2010:12) Berdasarkan garis besar, SPT dapat dibedakan menjadi dua:

1. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

2.9.4 Batas Waktu penyampaian SPT

Sesuai Pasal 3 Ayat (3) *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampain SPT diatur:

1. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk SPT Tahunan dibedakan menjadi:
 - a. SPT Tahunan WP Orang Pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Bagi yang tahun pajaknya menggunakan tahun kalender, maka 3 bulan tersebut sama dengan akhir bulan Maret tahun kalender berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- SPT Tahunan WP badan termasuk BUT paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Bagi yang tahun pajaknya menggunakan tahun kalender, maka 4 bulan tersebut sama dengan akhir bulan april tahun kalender berikutnya.

Menurut Wirawan, Waluyo (2003 : 37) untuk memudahkan dalam menetapkan batas waktu penyampaian SPT baik Masa maupun Tahun, berikut disampaikan batas waktu pembayaran dan batas waktu Pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan:

1. SPT Masa

Tabel 2.2 Batasan waktu pelaporan SPT Masa

No	Jenis SPT	Batas waktu pembayaran	Batas waktu pelaporan
1	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
2	PPh Pasal 15	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
3	PPh Pasal 21/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
4	PPh Pasal 23/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
5	PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
6	PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Akhir masa Pajak Terakhir	Tgl. 20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
7	PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
8	PPh Pasal 22 – Bendahara Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tgl. 14 bulan berikut
9	PPh Pasal 22 – Pertamina	Sebelum Delivery Order dibayar	
10	PPh Pasal 22 – Pemungut Tertentu	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
11	PPN dan PPn BM – PKP	Akhir bulan berikutnya setelah	Akhir bulan berikutnya setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis SPT	Batas waktu pembayaran	Batas waktu pelaporan
		berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan	berakhirnya Masa Pajak
12	PPN dan PPn BM – Bendaharawan	Tgl. 7 bulan berikut	Tgl. 14 bulan berikut
13	PPN & PPn BM – Pemungut Non Bendahara	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
14	PPH Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 21, 23, PPN dan PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu	Sesuai batas waktu per SPT Masa	Tgl. 20 setelah berakhirnya Masa Pajak Terakhir

Sumber : www.online-pajak.com

2. SPT Tahunan

Tabel 2.3 Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran Tahunan	Batas Waktu Pelaporan
1	PPH – Orang Pribadi	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak
2	PPH – Badan	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak
3	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	----

Sumber : www.online-pajak.com

2.10 Pandangan Islam terhadap pajak

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Munawwiw, (2002) dalam Surahman dan Ilahi (2017). Sedangkan secara umum pajak (*tax*) adalah harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara.

Ada sebuah hadis yang berbunyi, “*Tidak masuk surga petugas pajak*”.

Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan petugas pajak ini adalah Orang yang mengambil ‘*ushr* (bea cukai) dari harta kaum Muslimin secara paksa yang melampaui batas, sehingga dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya. Petugas pemungut ‘*ushr* (bea cukai) dalam hadis ini juga diterjemahkan sebagai petugas pajak, padahal maksudnya adalah petugas pemungut ‘*ushr* (bea cukai) (Gusfahmi, 2007) Surahman dan Ilahi (2017).

Pajak merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan. Dalam hal ini, iuran yang dibayarkan berasal dari harta yang dimiliki oleh seseorang ataupun badan. Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan istilah *Adh Dharibah*, yang artinya yaitu mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau mebebaskan, dan lain-lain.

Allah SWT telah berfirman dalam QS Al-Muthaffifin ayat 1-3 Sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (2) (yaitu) orang-orang yang apabila takaran dari orang lain mereka minta di cukupkan. (3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi.” Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Muslim), yaitu:

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).
2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bumi dan Bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Pajak boleh saja dianggap utang seseorang kepada negara yang harus dibayarkan sebelum zakat dikeluarkan, tetapi yang terbaik adalah zakat yang dibayarkan terlebih dahulu baru kemudian pajak. Hal ini sesuai dengan kekuatan hukumnya, di mana zakat ditetapkan langsung oleh Allah SWT, sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad. Menurut Qardhawi Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1. Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar-benar kosong.
2. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.

3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan money politic.
4. Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

5. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah

Menurut Zallum, ada enam pengeluaran yang boleh dibiayai oleh pajak

menurut Islam (Gusfahmi: 179), yaitu:

1. Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti: pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya.
3. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil.
4. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat.
5. Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat, misalnya jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
6. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, sementara harta di baitul amal tidak ada atau kurang.

Dari uraian pajak yang telah diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan perbedaan antara pajak dan zakat, yaitu; (Murtadho Ridwan, 2014)

1. Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga Negara kepada pemimpinnya (penguasa).
2. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam al-Quran dan Hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
3. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Zakat berlaku bagi setiap Muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.

Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat.

2.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Hasil penelitian terdahulu

No	Nama dan Tahun penelitian	Judul	Hasil penelitian
1	Sudarno, Nofila Angelina, 2020	<i>Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Bina Mandiri Perkasa</i>	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pajak Penghasilan Badan belum diterapkan dengan baik karena perhitungan yang dilakukan oleh CV. Bina Mandiri Perkasa belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
2	Debie Sukma, 2013	<i>Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru</i>	Dari hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi belum sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan, karena ada biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut Undang-undang Perpajakan, antara lain perusahaan memasukkan biaya natura, dan biaya rekreasi, sedangkan biaya telepon seluler dapat diperkenankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto, namun didalam Undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
3
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Nama dan Tahun penelitian	Judul	Hasil penelitian
			Perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan
3	Amin Alkadri Purba, 2019	<i>Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mina Mulia Perkasa.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi belum sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan, karena terdapat biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut Undang-Undang Perpajakan, antara lain perusahaan memasukkan biaya natura, dan biaya rekreasi, sedangkan biaya telepon seluler dapat diperkenankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto, namun didalam Undang-Undang Perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan
4	Dessy Herlisnawati, Yola Fahmi Ahmad, 2013	<i>Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Akasha Wira Internasional Tbk</i>	Berdasarkan hasil uraian pembahasan Perencanaan Pajak (tax planning) berpengaruh dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Akasha Wira Internasional Tbk
5	Fitriani Saragih,	<i>Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Karya Natal</i>	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pajak Penghasilan Badan belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No	Nama dan Tahun penelitian	Judul	Hasil penelitian
			diterapkan dengan baik karena perhitungan yang dilakukan oleh CV. Karya Natal belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
6	Hardiansyah,	<i>Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Pelabuhan Indonesia (Persero) Makassa Iv</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis dan perhitungan pajak penghasilan PT Pelindo IV telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang perpajakan No 36 Tahun 2008. Namun, terdapat beberapa item yang dikoreksi oleh pihak perpajakan seperti yang tertera dalam laporan SPT perusahaan antara lain penghasilan yang dikenakan PPh final, biaya-biaya, beban serta penyisihan piutang.

Sumber: Berbagai Jurnal Terdahulu yang Dipublikasikan

2.12 Kerangka pemikiran

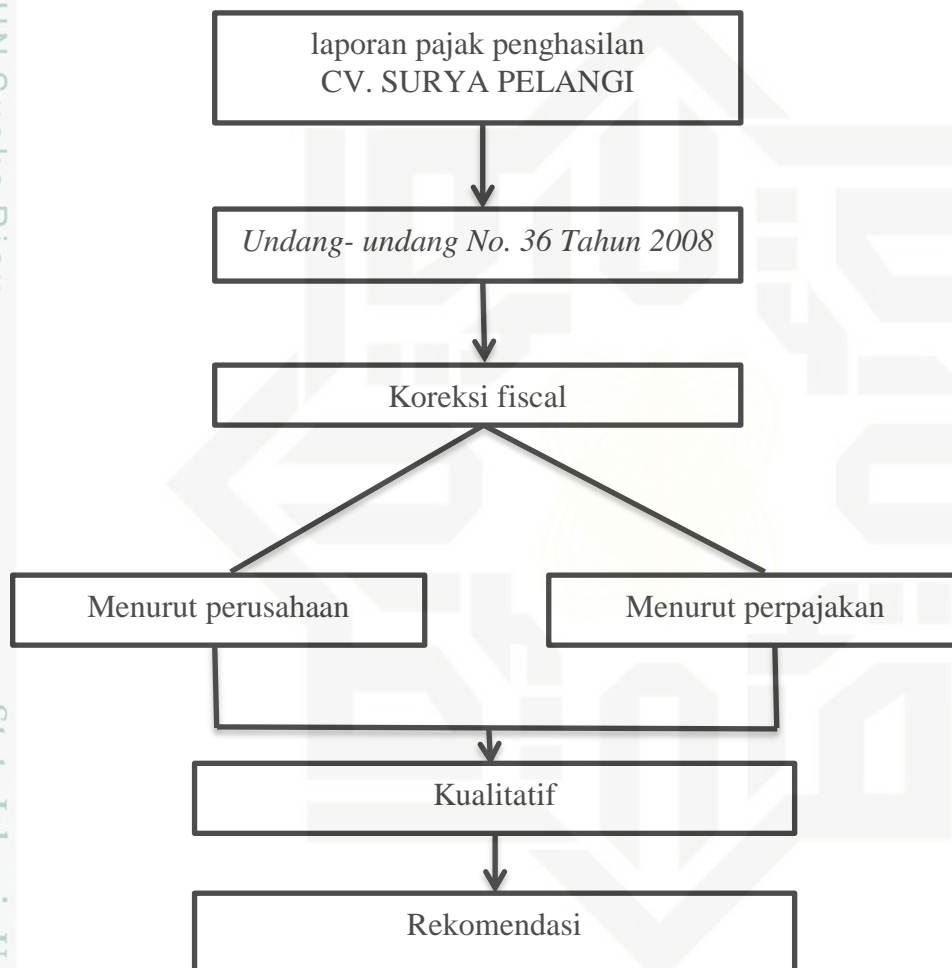
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan pada CV Surya Pelangi dengan teori pendukung Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selanjutnya akan dilakukan Koreksi fiskal dengan membandingkan analisis akuntansi pajak penghasilan badan menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan.

Analisis menggunakan kualitatif interpretatif yang berusaha mengungkapkan alasan dibalik fenomena yang terjadi dalam perusahaan. Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan temuan yang akan dijadikan sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekomendasi yang berguna bagi perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Secara ringkas proses yang dilakukan dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat Usaha Konveksi Surya Pelangi

Usaha konveksi ini mulai dirintis pada tahun 2000. Surya memulai kariernya dengan bekerja kepada orang lain. Dengan bermodal tamatan SMK, Surya memulai langkahnya dengan kursus menjahit di konveksi orang lain. Sistem kerjanya tidak dihitung berdasarkan jam, melainkan berdasarkan kemampuan pekerja dalam memotong, menjahit hingga menjadi pakaian jadi yang siap untuk dikemas. Dengan kegigihan Surya dalam kursus menjahit disini ia mulai tergiur dengan membuka usaha home konveksi sendiri yang dibangunnya dengan tempat usaha rumah papan yang amat sederhana tanpa karyawan.

Ia mencoba melakukan sebuah pemikiran untuk memulai bisnis industri dari bahan-bahan kain yang diolah menjadi pakaian siap dengan inovasi yang beragam dalam sebuah bidang konveksi. Bakat yang diperolehnya dari mengikuti kursus menjahit begitu lulus Sekolah Menengah Akhir ini, menghantarkan Surya menjadi enterpreneur yang handal dalam bidang konveksi. Konveksi ini mulai dibangun oleh pak Surya sekitar tahun 2005 setelah menikah dengan istrinya yang mana mertuanya merupakan seorang pedagang pakaian. Atas dorongan istri memulai usaha ini dengan memperoleh modal bahan-bahan kain yang siap diolah dari seorang pengusaha kain. Dengan bermodal kepercayaan dari pengusaha tersebut dalam menggunakan bahan- bahan kain darinya. Surya mencoba mengepakan sayapnya ke berbagai pasar-pasar grosir, sekolah, dinas pemerintahan dan masyarakat umum untuk menawarkan hasil produksinya.

Dengan pengalaman yang baik selama 5 tahun bekerja di home konveksi orang lain, disini Surya mulai membuka lapangan usaha dengan menerima karyawan, mulai dari ibu rumah tangga, bapak-bapak, anak gadis hingga anak magang, proses magang disini bukan dari instansi sekolah melainkan bagi pihak umum yang ingin belajar menjahit. Bagi yang ingin magang harus mempunyai dasar ilmu menjahit terdahulu selama 1 bulan.

3.2 Visi dan Misi

Konveksi Surya Pelangi ini merupakan badan usaha yang berbentuk CV atau persekutuan komanditer yaitu suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Dari tahun ketahun usaha konveksi CV. Surya Pelangi ini mulai mengalami peningkatan, terlihat dari banyaknya konsumen yang menyukai hasil dari jahitan, bordiran hingga penyablonan dari konveksi CV. Surya Pelangi yang menjadi visi dan misi utama dari konveksi ini.

Adapun Visi dan Misi Surya sendiri adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan mencari mitra kerja yang senang dengan hasil pekerjaannya. Konsumennya mulai dari berbagai instansi seperti pihak sekolah, dinas, organisasi hingga masyarakat umum. Jenis pakaian yang dijahit, dibordir dan di sablon pada konveksi CV. Surya Pelangi ini adalah baju kerja, boutique, dinas, seragam sekolah, kaos/konveksi. Hasil produksi konveksi CV. Surya Pelangi ini di distribusikan ke pasar-pasar grosir seperti: Arengka, Pasar Kodim dan Ramayana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Tujuan Mendirikan Konveksi Surya Pelangi

Seiring konveksi ini mulai terkenal di khalayak umum Surya mulai mencari tempat yang strategis dan ia mulai membuka usahanya dengan berkembang pesat. Dari awalnya usaha ini berdiri sampai sekarang ini Surya selalu membeli bahan baku pada para pengusaha kain di Bandung kualitas kain yang lebih bagus.

Tujuan pertama mendirikan Konveksi CV. Surya Pelangi ini sendiri adalah menciptakan lapangan kerja khususnya bagi ibu Rumah Tangga dan khalayak umum yang mempunyai bakat atau keahlian dalam menjahit. Disini Surya menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat muslim. Dan mencari keuntungan yang halal dan barokah dengan sebaik baiknya. Tujuan yang ke dua mendirikan Konveksi CV. Surya Pelangi ini adalah menciptakan pakaian jadi yang berkualitas dan mampu menarik konsumen sesuai dengan model yang diinginkan konsumen dan model yang berkembang pada saat ini. Adapun jenis pakaian disini bervariasi mulai dari baju kerja, boutique, dinas, seragam sekolah, kaos/konveksi hingga baju kebaya.

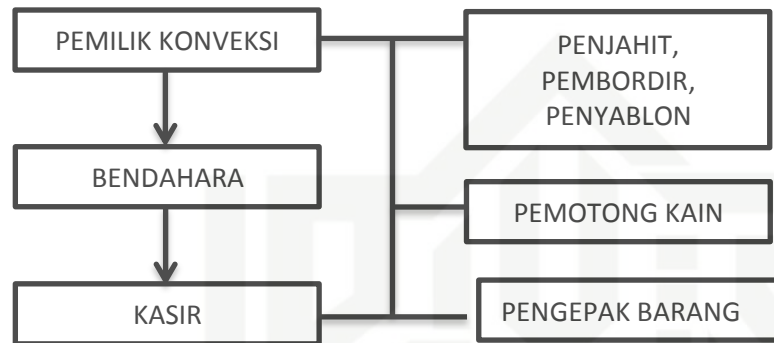
Dengan demikian bukan hanya keuntungan semata disini tetapi Surya juga mengutamakan kemaslahatan umat khususnya umat muslim yang mempunyai keahlian menjahit namun tak mempunyai cukup modal untuk membuka usaha sendiri maka Surya menciptakan lapangan pekerjaan dengan menerima siapapun yang berminat bekerja dengannya. Tak lepas dengan ajaran Islam, Surya juga mempunyai aturan kerja disaat waktunya sholat dan makan siang, malah Surya sendiri yang selalu mengingatkan karyawannya untuk menjalankan ibadah sholat terlebih dahulu ketika waktu sholat tiba.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Struktur Organisasi

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Konveksi CV. Surya Pelangi di
Jalan Puyuh Mas Kecamatan Marpoyan Damai
Pekanbaru



Sumber : *Wawancara dengan Bendahara Konveksi Surya Pelangi, Erda Ningsih.*

Pada konveksi CV. Surya Pelangi ini pemilik konveksi tidak hanya sebagai pemilik tetapi juga ikut serta dalam aktivitas produksi seperti melakukan pemotongan kain, hingga proses menjahit pakaian. Pada konveksi CV. Surya Pelangi dalam hal pembagian upah dikelola oleh seorang bendahara yang bertugas memberikan upah kepada karyawan, pembagian upah dapat dilakukan pada setiap satu minggu sekali yaitu pada hari sabtu atau sebulan sekali tergantung kesepakatan. Selain bendahara juga terdapat kasir yang mengelola keuangan yang berkaitan dengan konsumen dan pemasok bahan-bahan.

Dalam hal produksi pakaian dilakukan oleh pemotong kain, penjahit, pembordir dan penyablon pakaian yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda, setelah proses produksi selesai dilakukan maka dilakukanlah pengepakan barang, dengan demikian pakaian telah siap untuk di distribusikan kepada konsumen yang telah melakukan pemesanan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian, mengemukakan saran-saran sebagai masukan pada CV Surya Pelangi.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil perhitungan berdasarkan penulis dapat diambil kesimpulan bahwa CV. Surya Pelangi sudah menerapakan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan menurut PSAK, tetapi masih terdapat beberapa akun beban usaha yang tidak sesuai dengan *Undang-undang* Nomor 36 Tahun 2008.

Beban yang tidak sesuai yaitu:

1. Beban konsumsi pada laporan laba rugi CV. Surya Pelangi tahun 2018 tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 tentang menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pada ayat 1 huruf e, sehingga biaya konsumsi tersebut harus di koreksi fiskal positif.
2. Beban *prive* pada laporan laba rugi CV. Surya Pelangi tahun 2018 tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 tentang menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pada ayat 1 huruf i, sehingga biaya Prive tersebut harus di koreksi fiskal positif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Biaya entertain, sumbangan, infak dll pada laporan laba rugi CV. Surya Pelangi tahun 2018 tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Biaya entertain terdapat pada Pasal 9 tentang menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pada ayat 1 huruf f. Biaya Sumbangan terdapat pada pasal 6 ayat 1 huruf i, j, k, l, dan m.. sedangkan infak tidak diatur dalam UU PPh No.36 tahun 2008, sehingga biaya biaya tersebut harus di koreksi fiskal positif.
4. Biaya asuransi pada laporan laba rugi CV. Surya Pelangi tahun 2018 tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 tentang menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pada ayat 1 huruf d, sehingga biaya Asuransi tersebut harus di koreksi fiskal positif.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta beberapa kesimpulan, saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Diharapkan agar CV Surya Pelangi tetap melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diharapkan agar perusahaan memperhatikan beberapa akun-akun atau pos-pos yang sebelumnya telah dikoreksi fiskal sehingga laporan keuangan periode selanjutnya tidak dilakukan koreksi fiskal.
3. Diharapkan agar perusahaan tetap memperhatikan ketentuan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan karena peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang dinamis yang sewaktu-waktu dapat berubah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah QS. *Al-Muthaffifin* ayat 1-3

Agoes, sukrisno, dan Estralia Trisnawati, 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta

Direktur Jenderal Pajak. 2002. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 09/PJ.42/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan*

Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syari'ah*. Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hardiansyah, *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Padapt. Pelabuan Indonesia Iv (Persero) Makassar*. Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar, 2017

Hery, 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Hidayat, Taufik. 2014. *Teori Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Grasindo

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat: Jakarta

Jamaludin. 2011. *Pengantar Perpajakan*. Makassar : Alauddin Press.

Kartikahadi, Hans, et all, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Salemba Empat: Jakarta

Maman, Surahman & Fadilah Ilahi, 2017, "*Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*". Amwaluna, Vol.1, No.2.

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Muljono, Djoko, 2011. *Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta.

Murtadho Ridwan, 2014. *Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim*. Jurnal Zakat dan Wakaf. ZISWAF, Vol. 1, No. 1 Juni 2013.

Purba, Amin Alkadri, 2019, *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mina Mulia Perkasai*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007* tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008* tentang perubahan ketiga atas *UU Nomor 6 Tahun 1983* tentang Pajak penghasilan
- Republik Indonesia, 2000. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000* tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Saragih, Fitriani, *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Karya Natal*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.3, No.1, 2015 Hal.227-332
- Sari, Diana, 2014. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Sudarno, & Nofila Anggelina, *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Bina Mandiri Perkasa*, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Vol. 1, No.1, 2020 Hal.1-21
- Sujarweni, V. Wiratna, 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukma, Debie, *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru*, UIN SUSKA RIAU, 2013
- Sumarsan, Thomas, 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3*, Pedoman Perpajakan yang lengkap berdasarkan Undang-undang terbaru. Jakarta: PT Indeks
- Suparmono. 2010. *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba empat
- Soemitro, Rochmat. 2015. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 2 Revisi, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Susanto, Eko. 2014. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT. Indeks
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Salemba Empat: Jakarta
- www.gurupendidikan.co.id
- www.online-pajak.com

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Laporan Laba Rugi CV. Surya Pelangi Tahun 2018

	Debit	Kredit	Jumlah
Penjualan	Rp. 6.109.666.236		Rp. 6.109.666.236
HPP		Rp. 1.773.318.117	
Lab a Kotor			Rp. 4.336.348.119
Beban Usaha			
Gaji Karyawan Tetap		Rp. 423.348.975	
Gaji Karyawan Harian		Rp. 813.225.600	
Biaya Rekening Listrik		Rp. 68.127.020	
Biaya Rekening Telp/Hp, Wifi		Rp. 9.540.182	
Biaya Rekening Air		Rp. 7.962.300	
Biaya Benang		Rp. 32.856.500	
Biaya Kantong, Isolasi, Dll		Rp. 22.551.500	
Biaya Expedisi		Rp. 32.397.400	
Biaya Administrasi		Rp. 496.000	
Biaya Konsumsi		Rp. 235.357.500	
Biaya BBM/ Transportasi		Rp. 22.892.400	
Prive		Rp. 62.703.026	
Biaya ATK		Rp. 11.499.050	
Biaya Angsuran Bank, Pajak, Adm, Dll		Rp. 813.103.865	
Biaya Serba Serbi		Rp. 63.790.450	
Biaya Perbaikan Dan Pemeliharaan		Rp. 82.075.300	
Biaya Air Mineral		Rp. 3.440.000	
Biaya Akomodasi Dan Perlengkapan		Rp. 1.225.000	
Biaya Gas		Rp. 6.549.000	
Biaya Retribusi		Rp. 1.950.000	
Biaya Entertain, Sumbangan, Infak Dll		Rp. 13.126.000	
Biaya Asuransi		Rp. 3.250.000	
Biaya Behan/ Alat Proses Sablon		Rp. 8.598.050	
Biaya Sevice Kendaraan		Rp. 7.133.500	
Biaya Resleting, Kancing, Puring Dll		Rp. 7.133.500	
Jumlah Beban Usaha		Rp. 2.834.340.468	
Lab a Bersih Sebelum Pajak			Rp. 1.502.007.651
Pajak Penghasilan		Rp. 150.200.765	
Lab a Bersih Setelah Pajak			Rp. 1.351.806.886

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Neraca CV Surya Pelangi Tahun 2018

Keterangan	30/11/2018
Aktiva lancar	2.171.566.146,96
Kas & Bank	127.604.503,13
Piutang Dagang	1.051.180.273,97
Persediaan Barang	992.781.369,86
Aktiva Tetap	2.026.940.000,00
Tanah & Bangunan	1.630.000.000,00
Kendaraan & Investasi	446.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	(49.060.000,00)
TOTAL AKTIVA	4.198.506.146,96
Hutang lancar	1.497.834.410,96
Hutang Dagang	297.834.410,96
Hutang Bank	1.200.000.000,00
Hutang Lain-Lain	668.750.000,00
Hutang Jangka Panjang	668.750.000,00
Hutang Bank	
Modal	2.031.921.736,00
Laba di Tahan	1.250.322.184,75
Modal di Setor	600.000.000,00
Laba Periode Berjalan	181.599.551,25
TOTAL PASIVA	4.198.506.146,96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1941/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 2 Juni 2020 M
10 Syawwal 1441 H

Kepada
Yth. **Khairil Henry, SE, M.Si. Ak**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Reska Zahera
NIM : 11573203101
Jurusan : Akuntansi
Semester : X (Sepuluh)

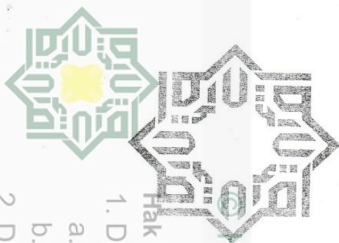
adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 1975112 199903 2 001

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4458/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 28 Desember 2020 M
13 Jumadil Awwal 1442 H

Kepada
Yth. Pimpinan CV. Surya Pelangi
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Reska Zahera
NIM. : 11573203101
Jurusan : Akuntansi
Semester : XI (Sebelas)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Surya Pelangi**".
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CV Surya Pelangi

KONVEKSI - BOUTIQUE - TAILOR - BORDIR KOMPUTER - SABLON
Jl. Puyuh Mas Ruko No. 2A-2B Tangkerang Tengah Pekanbaru

Office : 0761 887732 - 0761 7618887 - 0761 7893210
Hp : 0821 69345678 - 0812 68082400 - 0813 65709909

e mail : pelangi_konveksi@ymail.com
website : http://pelangi-konveksi.webs.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 034/ SPK / SK/XII/2020

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/4458/2020, hal : Izin Riset tertanggal 5 Agustus 2020, maka CV Surya Pelangi dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Reska Zahera
NIM : 11573203101
Jurusan : Akuntansi
Semester : XI (Sebelas)

Bener telah mengadakan penelitian di CV SuryaPelangi pada tanggal 5 Agustus 2020 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Surya Pelangi"**.

Demikian surat keterangan ini di perbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru 28 Desember 2020
Pimpinan CV Surya Pelangi



CV. SURYA PELANGI
Jl. Puyuh Mas No. 2A-2B
Tangkerang Tengah Pekanbaru
Hp : 0821 69345678
Phone : (0761) 8877 32

Rahmad Adi Suryono

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Reska Zahera dilahirkan di Siabu, 19 Juli 1995. Ayahanda bernama Rusli dan Ibunda bernama Rabu Intan. Penulis anak Kedua dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari SD Negeri 013 Siabu, Kab. Kampar selesai pada tahun 2007, Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Darul Falah Salo, Kab. Kampar selesai pada tahun 2010, dan melanjutkan pendidikan di MA Negeri 1 Kampar, Kab. Kampar selesai pada tahun 2013. Setelah itu masuk ke salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan yang bernama Wahana Prima Program Komputer Terpadu selama 1 tahun 6 bulan dan lulus sebagai siswa berprestasi pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur SBMPTN. Pada tanggal 16 Juli- 31 Agustus 2018 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Lawas, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar. Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Surya Pelangi” Di bawah bimbingan Bapak Khairil Henry, SE.,M.Si.,Ak. dan pada tanggal 08 Januari 2021 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai Memuaskan dan menyandang gelar sarjana Akutansi (S.Ak).